

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan mencakup semua aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan disini mengandung makna menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang pembangunan mengarah pada modernitas.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dengan masifnya implementasi Teknologi dan Komunikasi (TIK) diberbagai bidang kehidupan termasuk bidang pemerintahan sebagai sebuah konsep maupun target telah mampu memberi semangat baru bagi daerah dan pemimpin daerah di Indonesia untuk membuat berbagai inovasi implementasi teknologi diberbagai aspek kehidupan kota, kabupaten, hingga provinsi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan Berhubungan digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang dimasa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi.

Sejak Agustus 2020, Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah menerapkan Program Parkir Non Tunai didukung oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon dan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon sudah dan sedang melaksanakan Inovasi Sistem Pembayaran Parkir Non Tunai menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Kota Cirebon dan Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Tujuan diselenggarakannya inovasi ini adalah meningkatkan pelayanan parkir di Kota Cirebon. Dengan

memberikan alternatif pembayaran parkir non tunai kepada masyarakat. Maka diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (satgas P2DD) dibuat untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal Serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Terlebih, Dalam era pandemi Covid-19 ini, langkah-langkah pencegahan yang disarankan termasuk menjaga jarak, memakai masker wajah didepan umum, ventilasi dan penyaringan udara, mencuci tangan, menutup mulut saat bersin atau batuk. kontak langsung antara Juru Parkir dengan pengguna jasa parkir dalam transaksi pembayaran retribusi parkir melalui uang tunai sangat beresiko terdampaknya penyebaran virus Covid-19 khususnya kepada juru parkir.

Permasalahan dan usaha untuk mewujudkan sebuah Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS adalah kompleks, membutuhkan waktu lama, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kota. Program Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS melibatkan bukan hanya pemerintah, namun juga masyarakat, akademisi, perusahaan swasta, dan semua pemangku kepentingan Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemerintah berbasis elektronik tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah ataupun hambatan. Beberapa faktor penyebab permasalahan dan hambatan yang sering ditemui adalah :

1. Terhambatnya sarana dan Prasarana TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) dalam layanan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS di Kota Cirebon.
2. Rendahnya kualitas Juru Parkir dalam pelayanan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS di Kota Cirebon sehingga seringkali Juru Parkir tertipu oleh Masyarakat pada saat Transaksi pembayaran.
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat umum belum mengetahui program Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi “ **Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon**”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pernyataan masalah yang ingin diteliti yaitu mengenai : Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang menurut peneliti masih belum optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada permasalahan diatas, selanjutnya penulis menyusun Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
2. Faktor apa saja yang mendukung Implementasi Kebijakan Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
3. Faktor Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon?
4. Upaya apa saja dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

4. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara. Khususnya kajian Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Negara, terutama Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Cirebon agar lebih optimal dalam meningkatkan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS di Kota Cirebon.

Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang ingin diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam karya ilmiah ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 2016:155) mengatakan bahwa :

“Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.”

Menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:136) ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:137) mengatakan bahwa :

“komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan

dan apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.”

Menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:137)

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (missskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan (*Clarity*), komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber-sumber Daya

Menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:138) terdapat indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan, dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor

dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formula tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

atau “sikap dari pelaksana kebijakan” adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:139) adalah :

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Peraturan Birokrasi (*Staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini George C. Edwards mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif, adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulatif insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016:140)

mengatakan bahwa :

“yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.”

Dua karakter menurut George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2016: 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politic*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Teori dari George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS secara lebih mendalam.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan Model Implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan :

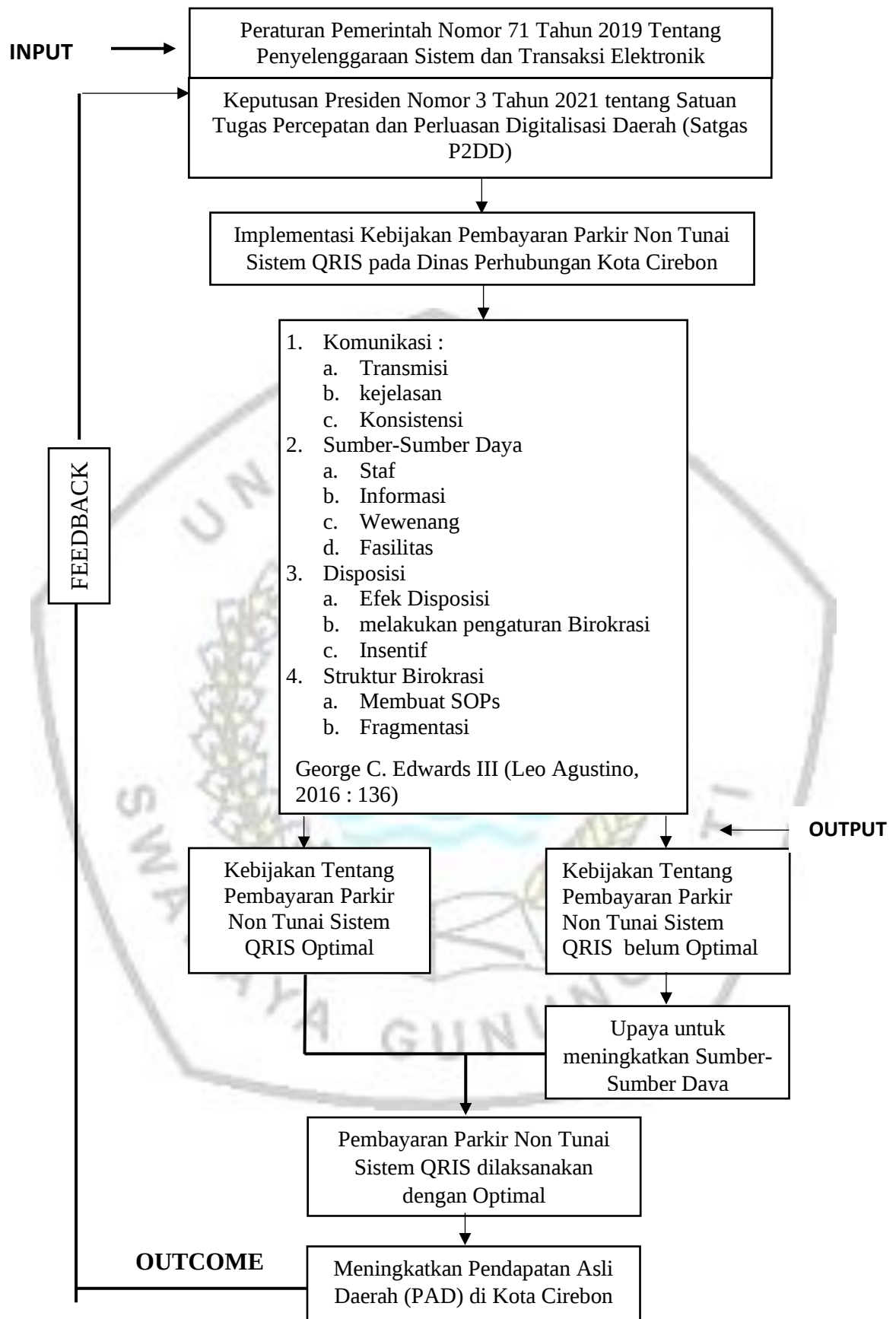
- a. Komunikasi

- b. Sumber-sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang membentuk Keberhasilan Implementasi yang dipengaruhi Komunikasi, Sumber-sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS dari keempat variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS dalam hal ini yaitu Rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pelayanan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat dalam Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon harus mampu menerapkan keempat variabel tersebut agar proses pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon berjalan maksimal.

Dari pelaksanaan implementasi kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat-pejabat/ atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dan Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, dimana diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Peran serta masyarakat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dapat mengambil bentuk yang semakin canggih. Pada taraf ini, peran media massa dan media elektronik dalam keseluruhan proses kebijakan

menjadi sangat penting. Media elektronik dapat berperan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, selain dapat memunculkan suatu isu dari masyarakat, menggiringnya masuk dalam agenda kebijakan serta memengaruhi proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasannya oleh masyarakat.

2. Pembayaran Elektronik Sistem QRIS

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital perlu pengaturan secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem (PJS) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan digunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat

digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket pesawat, donasi (Merchant) belogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Aspek kajian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan (George C. Edwards dalam Agustino Leo, 2016 : 136)	1. Komunikasi	- Transmisi - Kejelasan - Konsistensi
	2. Sumber-Sumber Daya	- Staf - Informasi - Wewenang - Fasilitas
	3. Disposisi	- Efek disposisi - Melakukan pengaturan Birokrasi - Insentif

	4. Struktur Birokrasi	- Membuat <i>standar Operating Procedures</i> (SOPs) - Melaksanakan Fragmentasi
--	-----------------------	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Menurut *Krick* dan *Miller* (dalam Moleong, 2016:4) mengatakan bahwa “Metode penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dari ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik pada kawasannya maupun dalam peristilahannya.”

Menurut *Bogdan* dan *Taylor* (dalam Moleong, 2016:4) mengatakan bahwa “metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Menurut Sugiyono (2017:85) mengatakan bahwa :

“Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan.”

Dengan kata lain sampel tersebut dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti. Kekuatan dari sampel *purposive* adalah dari sedikit kasus yang diteliti secara mendalam memberikan banyak pemahaman tentang topik.

Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci :
 - Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
2. Informan Pendukung
 - Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon
 - Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon
 - Juru Parkir di Lapangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian.

Sugiyono (2017 : 225) mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.”

Menurut Sugiyono (2017: 226-240) Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi :

1) Studi Kepustakaan atau Literatur

Penulis melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi yang relevan dari penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula dimana ada kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.

Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, langsung, tidak terstruktur, dan individual. Tanpa

wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.

b) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti di tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode studi dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda berupa buku, majalah, dokumen, peraturan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya dokumen juga tidak hanya berupa tulisan saja namun dapat berupa pula benda peninggalan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sama maknanya dengan dengan uji validitas dan uji realibilitas dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau alat pengumpul data utama dalam

penelitian kualitatif bukan angket seperti pada penelitian kuantitatif melainkan peneliti itu sendiri yang dibantu oleh instrument lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, alat perekam, dan lain-lain.

Menurut Lexy J. Moleong (2016 : 330) “Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”

Menurut Lexy Dengan Triangulasi, penulis dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori, penulis dapat melakukan dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data;
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan daya dapat dilakukan.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

Triangulasi data dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasanya penelitian, informan digali dari sumber lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kepala Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS Kota Cirebon.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan dan data mendukung penelitian. Jadi penelitian ini menekankan kepada Implementasi Kebijakan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2017:244) mengatakan bahwa :

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.”

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246) mengatakan bahwa :

“Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.”

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. dalam melakukan *display* data juga disarankan selain menggunakan teks naratif, juga dapat bisa berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Dalam mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c) *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti tulis dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Terusan Pemuda (Kompleks Perkantoran), diarea Jl. Pagongan Kota Cirebon. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu :

- a. Letak Dinas Perhubungan Kota Cirebon cukup strategis dari rumah peneliti dan mudah dijangkau oleh peneliti sehingga diharapkan dapat mempengaruhi jalannya penelitian.

- b. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.
- c. Karena adanya permasalahan mengenai Pembayaran Parkir Non Tunai Sistem QRIS, jadi peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang judul penelitian ini.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Jadwal dan waktu pelaksanaan penelitian ini selama 5 bulan dari bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021. Untuk lebih jelasnya rencana jadwal penelitian dapat dilihat seperti pada tabel Jadwal Penelitian, sebagai berikut.

